

**IMPLIKASI ETIS DARI
TEKNOLOGI INFORMASI**



Nur Rachma Annisa	(105030201111025)
Rizky Yakfi Rahmadi	(105030201111033)
Maya Novitasari	(105030207111022)

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012**

MORAL, ETIKA, DAN HUKUM

Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga Negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum.

Moral

Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil: “Perilaku orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan.” “Selalu ucapkan terima kasih,” Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita.

Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan di antara semuanya. “Melakukan apa yang secara moral benar,” adalah landasan dasar perilaku sosial kita.

Etika

Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata *etika* berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti “karakter”. Etika (*ethics*) adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka, Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, Negara, atau profesi.

Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi dari satu komunitas dengan yang lain. Keberagaman di bidang computer ini terlihat dalam bentuk peranti lunak bajakan (*pirated software*) peranti lunak yang diduplikasi secara illegal dan kemudian digunakan atau dijual. Di beberapa Negara praktik ini lebih menyebar dibandingkan yang lain. Pada tahun 2004, diperkirakan sekitar 21 persen peranti lunak yang digunakan di Amerika Serikat telah dibajak; angka ini melonjak menjadi 32 persen di Australia dan 90 persen di Cina.

Beberapa orang mungkin berkata bahwa angka-angka ini menunjukkan bahwa para pengguna computer di Cina tidak seitis pengguna computer di Amerika Serikat. Namun sebenarnya tidak selalu demikian. Beberapa budaya, khususnya di Negara-negara Asia, mendorong orang-orang untuk saling berbagi. Dalam peribahasa Cina, “Orang yang berbagi harus dihargai; sedangkan yang tidak harus dihukum.” Meskipun demikian, pembajakan peranti lunak adalah suatu masalah, karena tidak terdapat insentif untuk merancang dan mendistribusikan peranti lunak baru kecuali jika para penggunanya menyadari nilai ekonomisnya.

Hukum

Hukum (*law*) adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan computer dibidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan computer. Hal ini dikarenakan pada saat itu computer merupakan inovasi baru, dan system hokum membutuhkan waktu untuk mengejanya.

Pada tahun 1966, kasus kejahatan computer pertama menjadi berita ketika seorang programmer untuk sebuah bank mengubah suatu program computer sehingga program tersebut tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang ditarik. Ia dapat terus menulis cek meskipun tidak ada uang di dalam rekeningnya. Tipuan ini bekerja hingga computer tersebut rusak, dan pemrosesan manual mengungkapkan rekening dengan saldo yang sudah negatif dan tidak ditandai tersebut. Programmer tersebut tidak dituntut atas kejahatan computer, karena pada saat itu tidak ada hokum mengenai kejahatan tersebut. Sebaliknya, ia dituntut atas tuduhan membuat entri palsu pada catatan bank.

KEJAHATAN KOMPUTER Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan computer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan computer:

- Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan (*The Small Business Computer Security and Education Act*) ditetapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan (*Small Business Computer Security and Education Advisory Council*). Dewan ini bertanggung jawab untuk member nasihat

kepada Kongres mengenai masalah yang berhubungan dengan kejahatan computer terhadap usaha-usaha kecil dan untuk mengevaluasi efektifitas dari hukum pidana Negara dan federal dalam mencegah dan menghukum kejahatan computer.

- Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan Melalui Komputer (*Counterfit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act*) menetapkan bahwa merupakan suatu kejahatan federal jika seseorang mendapatkan akses tanpa otorisasi atas informasi yang berhubungan dengan pertahanan Negara atau hubungan luar negeri. Undang-undang ini juga mengenakan tindak pidana ringan pada usaha mendapatkan akses tanpa otorisasi ke suatu computer yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Privasi Keuangan (*Right to Financial Privacy Act*) atau Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Wajar serta menyalahgunakan informasi pada computer yang dimiliki pemerintah federal.

MELETAKKAN MORAL, ETIKA, DAN HUKUM PADA TEMPATNYA

Penggunaan computer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika computer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan.

KEBUTUHAN AKAN BUDAYA ETIKA

Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penney pada JCPenney Colonel John Patterson di National Cash Register, atau Thomas J. Watson, Sr. di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting pada organisasinya sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya.

Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika (*ethics culture*).

Bagaimana Budaya Etika Diterapkan

Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi, dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui tiga tingkat, dalam bentuk credo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan.

Kredo Perusahaan (*Corporate credo*) adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan.

Program Etika (*ethics program*) adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang di desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan credo perusahaan.

Kode Perusahaan Yang Disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industry atau profesi tertentu. Di bab yang akan datang akan dipelajari kode etik untuk profesi system informasi.

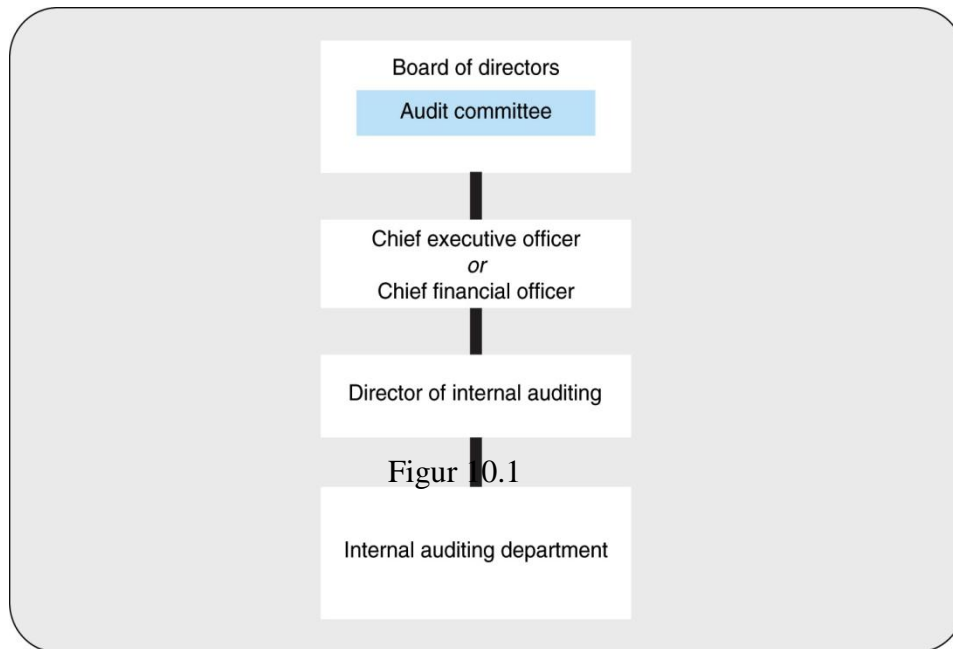
Meletakkan Credo, Program, dan Kode pada Tempatnya

Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan.

AUDIT INFORMASI

Saat menyusun etika penggunaan computer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal (*ekternal auditor*) dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal (*internal auditor*), yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal, namun setelah peristiwa Enron praktik ini tidak berlanjut. Praktik ini merupakan salah satu kegagalan Arthur Andersen dengan Enron. Badan Pengawas Pasar Modal (*Securities and Echange Comission*) telah menerapkan pembatasan-pembatasan pada jumlah audit internal yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal. Hal ini juga merupakan salah satu kegagalan Arthur Andersen dengan Emerson.

Figur 10.1 menunjukkan salah satu cara populer yang menempatkan audit internal di dalam organisasi. Dewan direktur mencakup komite audit (*audit committee*), yang mendefinisikan tanggung jawab dari departemen audit internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Direktur audit internal (*director of internal audit*) mengelola departemen audit internal dan biasanya melapor ke CEO atau direktur keuangan (*chief financial officer-CFO*). Posisi tingkat tinggi audit internal di dalam organisasi menjaga agar posisi ini dihormati sebagai aktivitas yang penting dan mendapatkan kerja sama dari para manajer di semua tingkat.



Posisi Audit Internal dalam organisasi

Pentingnya Objektivitas

Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan dewan komisaris, CEO, dan CFO.

Agar para Auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional system yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasihat. Mereka membuat rekomendasi untuk manajemen, dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut.

Jenis Aktivitas Audit

Terdapat empat jenis dasar aktivitas audit internal: financial, operasional, beriringan, dan desain system pengendalian internal.

Audit Financial (*financial audit*) memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal. Pada tugas lain, auditor internal merupakan seluruh pekerjaan audit sendiri.

Audit operasional (*operational audit*) tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis system pada tahap analisis dari masa siklus perancangan system. Sistem yang dipelajari hampir selalu berbentuk virtual dan bukan fisik, namun tidak selalu melibatkan computer.

Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari tiga fitur system dasar:

- Kecukupan pengendalian.
- Efisiensi.
- Kepatuhan dengan kebijakan perusahaan.

Ketika para spesialis informasi merancang system, mereka mencari fitur-fitur yang sama ini.

- Audit berkelanjutan
- Desain system pengendalian internal.

Subsistem Audit Internal

Dalam system informasi financial, subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan system merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan system informasi yang terkendali dengan baik, dan system tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika.

MENERAPKAN ETIKA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun credo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut.

Kode Etik

Association for Computing Machinery (ACM) yang didirikan pada tahun 1947, adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun *kode etik dan perilaku profesional (Code of Ethics and Professional Practice)* yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, *Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak (Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice)* dinuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak.

Kode Etik dan Perilaku Profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan “keharusan”, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi empat bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat.

- 1. Keharusan Moral Umum.** Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral (member kontribusi kepada masyarakat; menghindari bahaya; berlaku jujur, dapat dipercaya, dan adil) dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hokum (hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan).
- 2. Tanggung Jawab Profesional yang Lebih Spesifik.** Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas disini. Isu hokum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai computer juga dibahas.
- 3. Keharusan Kepemimpinan Organisasi.** Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya computer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak

lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari computer, serta melindungi kepentingan para pengguna.

- 4. Kepatuhan terhadap Kode Etik.** Di sini, anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik.

Kode ACM membahas lima dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan computer - moral, hukum, kinerja professional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Tabel 10.1 mengilustrasikan bagaimana lima wilayah ini dibahas oleh tiga bagian utama. Meskipun kode ACM ditujukan untuk pengarahan para anggota ACM, kode ini memberikan panduan yang baik untuk semua professional computer.

Tabel 10 – 1. Topik yang Tercakup dalam Kode Etik dan Perilaku Profesional ACM

	MORAL BEHAVIOR	LEGAL RESPONSIBILITY	PROFESSIONAL PERFORMANCE	SOCIAL RESPONSIBILITY	INTERNAL SUPPORT
GENERAL MORAL IMPERATIVES	X	X			
MORE SPECIFIC PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES	X	X	X	X	
ORGANIZATIONAL LEADERSHIP IMPERATIVES		X			X

Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak

Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada system informasi dan terdiri atas ekspektasi di delapan hal penting:

1. Masyarakat
2. Klien dan atasan
3. Produk
4. Penilaian
5. Manajemen
6. Profesi

7. Kolega
8. Diri Sendiri

Lima dari hal diatas berkaitan dengan tanggung jawab dimana ahli tersebut menjadi bagian (Masyarakat, Klien dan Atasan, Manajemen, Profesi dan Kolega). Dua hal (Produk dan Penilaian) berkaitan dengan kinerja professional, dan satu hal (Diri sendiri) mengacu pada peningkatan diri sendiri.

Pendidikan Etika Kmputer

Program edukasi formal dalam etika computer tersedia dari beragam sumber – mata kuliah di perguruan tinggi, program professional, dan program edukasi swasta.

Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. Di awal pendiriannya, ACM merancang suatu model kurikulum computer yang menentukan berbagai mata kuliah computer yang harus ditawarkan institusi pendidikan.

Program Profesional. Asosiasi Manajemen Amerika (*American Management Association*) menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti etika.

Program Edukasi Swasta. LRN*, Leagal Knowledge Company, menawarkan modul mata kuliah berbasis Web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika.

Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap-siap mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industry, dan program professional dan swasta memungkinkan manajer dan karyawan di setiap tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan perubahan tuntutan sosial.

ETIKA DAN CIO

Kebutuhan untuk mengembalikan integritas ke dalam dunia bisnis Amerika tidak pernah menjadi lebih besar. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk mendatangi keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi yang berkenaan dengan bisnis untuk memberikan informasi financial yang dibutuhkan kepada para eksekutif.

Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Terlebih lagi, sebagai seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi penuh waktu, CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut:

- Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi.
- Mempelajari system informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan.
- Mendidik eksekutif perusahaan mengenai system-sistem keuangan.
- Mengintegrasikan ke dalam system informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian.
- Secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan.
- Mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi.

Dengan mengikuti program seperti ini, CIO dapat menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

McLeod, Raymond dan George P. Schell. 2007. *Management Information Systems*. Pearson Education: New Jersey

